

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena global seperti perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan terbesar yang dihadapi. Keberhasilan industri yang tumbuh di dunia saat ini, yang sebelumnya berjalan lambat menjadi cepat adalah hasil revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 lalu (Pratiwi dan Sari, 2016). Tetapi, dibalik keberhasilan guna mempercepat laju perekonomian, terdapat dampak buruk yang tidak bisa dihindari yaitu adanya penurunan kualitas lingkungan yang sejalan dengan cepatnya pertumbuhan industri, retensi karbon, serta gas rumah kaca lainnya juga cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Menurut Solomon *et al.*, (2007) rata-rata suhu permukaan global mengalami peningkatan dengan laju $0.74^{\circ}\text{C} \pm 0.18^{\circ}\text{C}$ yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 10 negara yang kaya akan hutan. Hampir 70% daratan di Indonesia ditutupi oleh hutan. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami kerusakan hutan tertinggi di dunia. Peristiwa deforestasi dan degradasi hutan setidaknya menyumbang lebih dari 60% dari emisi karbon di Indonesia. Misalnya kebakaran lahan di Kepulauan Riau tahun 2016 juga memiliki kaitan terhadap perubahan iklim. Hal tersebut seharusnya menjadi fokus perhatian terhadap pentingnya mengakhiri pendekatan bisnis konvensional dalam pengelolaan lahan di Indonesia apabila dunia berkeinginan mengurangi emisi karbon (Pratiwi dan Sari, 2016)

Untuk mengatasi hal itu, Indonesia telah melakukan upaya untuk mengurangi emisi dan pencegahan lebih lanjut dari pemanasan global dengan menyetujui Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan mengeluarkan Keputusan Presiden No.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Keputusan Presiden no. 71 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Kiswanto, 2014). Upaya pengurangan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku usaha dapat diketahui dari *Carbon Emission Disclosure* (Muid, 2014).

Pengungkapan emisi karbon merupakan kontribusi entitas terhadap perubahan lingkungan dan iklim, khususnya pada pemanasan global (Kiswanto, 2014). Keberadaan entitas bisnis tentunya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat, sehingga tempat kegiatan perusahaan dituntut untuk selaras dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan informasi terkait pengungkapan lingkungan, terutama pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan emisi karbon di Indonesia saat ini masih *voluntary disclosure* dan praktiknya pun masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis. Pradini dan Kiswara (2013) mengatakan bahwa praktik pengungkapan emisi gas rumah kaca dan emisi karbon masih minim untuk memenuhi pedoman ISO 14064-1. Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon mempunyai beberapa pertimbangan diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder*, menghindari adanya ancaman terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca (*greenhouse gas*) dengan meningkatkan *operating costs*, mengurangi permintaan

(*reduced demand*), risiko reputasi (*reputational risk*), proses hukum (*legal proceedings*), serta denda dan penalti (Berthelot dan Robert, 2011).

Pengungkapan emisi karbon merupakan suatu bentuk pelaksanaan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yakni transparansi dan akuntabilitas. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan tata kelola perusahaan serta menilai konsistensi penerapan tata kelola perusahaan termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dibentuk komite kebijakan tata kelola perusahaan (OJK, 2014). Dengan transparansinya pengungkapan mengenai aktivitas operasional perusahaan diharapkan mampu meyakinkan investor untuk berinvestasi di perusahaan. Adanya keberadaan komite tata kelola perusahaan diharapkan dapat membantu tugas dewan komisaris dalam meningkatkan tingkat pengungkapan yang lebih transparan pada laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang menyebutkan asas-asas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dalam perusahaan, salah satunya dalam praktik pengungkapan emisi karbon.

Salah satu faktor *Corporate Governance* yang berpengaruh atas pelaksanaan pengungkapan lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan yang dimiliki oleh pihak institusi agar dapat mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan manajemen. Institusi yang aktif dalam *corporate governance* akan lebih memilih perusahaan yang pengungkapannya lebih informatif dibandingkan

perusahaan yang tidak transparan dalam melakukan pengungkapan lingkungannya. Investor institusional memiliki *power* dan *experience* serta bertanggung jawab dalam penerapan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan *stakeholder* sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan (Linggasari, 2015). Hasil penelitian Ghomi dan Leung (2013) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan atas aktivitas operasionalnya akan dapat diterima oleh masyarakat dan *stakeholder*. Bersamaan dengan hal itu, terkait dengan berkembang pesatnya industri dengan berbagai macam tipe yang ada di Indonesia, terdapat perusahaan yang masuk dalam golongan intensif dalam menghasilkan karbon. Industri yang termasuk golongan intensif dalam menghasilkan karbon akan mendapat tekanan lebih besar dari masyarakat sehingga membuat industri intensif lebih berpeluang besar untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dibandingkan perusahaan yang non intensif (Pratiwi dan Sari, 2016). Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon sebagian besar merupakan industri yang aktivitas operasionalnya berpengaruh tinggi terhadap lingkungan.

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul mempunyai strategi lingkungan yang proaktif (Clarkson *et al*, 2008). Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat. Perusahaan diharapkan dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga perusahaan mendapat pengakuan dari masyarakat. Hal itu dapat diperoleh

dengan menyelaraskan kegiatan perusahaan dengan nilai-nilai dan norma masyarakat seperti dengan melestarikan lingkungan sekitarnya. Semakin baik kinerja lingkungan semakin tinggi perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Verrecchia (1983) dalam Jannah dan Muid (2014) mengatakan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang proaktif mempunyai insentif secara sukarela mengungkapkan informasi terkait lingkungan, seperti tingkat emisi karbon yang dihasilkan dalam rangka mengungkapkan tipe kinerjanya yang tidak secara langsung diamati oleh investor serta pemangku kepentingan eksternal lainnya.

Perusahaan dalam pengungkapan emisi karbon tidak hanya dilihat dari kinerja lingkungannya saja, melainkan terdapat faktor pengaruh kinerja keuangan yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengungkapkan emisi karbon. Salah satu faktor tersebut yaitu profitabilitas. Tingkat profitabilitas memiliki tujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Purwandari, 2012). Perusahaan yang memperoleh laba tinggi cenderung untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Lorenzo *et al* (2009) mengatakan bahwa semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut secara finansial memiliki kemampuan untuk memasukkan strategi pengurangan emisi karbon ke dalam strategi bisnisnya.

Faktor pengaruh kinerja keuangan lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengungkapan emisi karbon yaitu *leverage*. Apabila suatu perusahaan mempunyai kewajiban yang lebih tinggi dari hutang dan pembayaran kembali bunga maka akan timbul pembatasan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan strategi

pengurangan dan pengungkapan emisi karbon. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka tanggung jawabnya terhadap *stakeholder* yakni kreditur semakin besar. Sehingga, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan lebih memilih melunasi kewajiban terhadap kreditur dibandingkan dengan melakukan pengungkapan karena melakukan pengungkapan sukarela seperti pengungkapan lingkungan hanya akan menambah beban bagi perusahaan (Nugraha, 2015).

Sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat tercermin dari ukurannya. Perusahaan dengan ukuran besar atau bisa dikatakan perusahaan publik dapat digambarkan memiliki tanggung jawab lebih besar, tidak hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan pemerintah, kreditur serta investor (Suardi dan Purwanto, 2015). Perusahaan dengan ukuran besar dianggap mampu dalam ketersediaan sumber daya untuk memenuhi biaya pengurangan polusi dan biaya pengungkapan terkait gas rumah kaca (Freedman dan Jaggi, 2005). Oleh sebab itu, perusahaan dengan ukuran besar akan cenderung meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan termasuk di dalamnya pengungkapan emisi karbon perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, praktik pengungkapan emisi karbon di negara-negara berkembang masih bersifat *voluntary*. Oleh sebab itu, terdapat banyak faktor yang menjadi motivasi dan insentif perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Faktor-faktor tersebut bisa berupa faktor tekanan eksternal dan faktor kendala/penghambat yang mempengaruhi luas pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan kembali variabel yang sudah ada dari penelitian Saptiwi (2018) mengenai pengaruh tipe industri, kinerja lingkungan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon, dan penelitian Saptiwi (2018) memberikan hasil bahwa kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Variabel baru yang ditambahkan pada penelitian ini adalah komite tata kelola dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul : **“Pengaruh Komite Tata Kelola, Kepemilikan Institusional, Tipe Industri, Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah keberadaan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
- 3) Apakah tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
- 4) Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?

- 5) Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?
- 6) Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon?
- 7) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif keberadaan komite tata kelola terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif tipe industri terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.
5. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon.
6. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh negatif *leverage* terhadap pengungkapan emisi karbon.
7. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan di Indonesia.

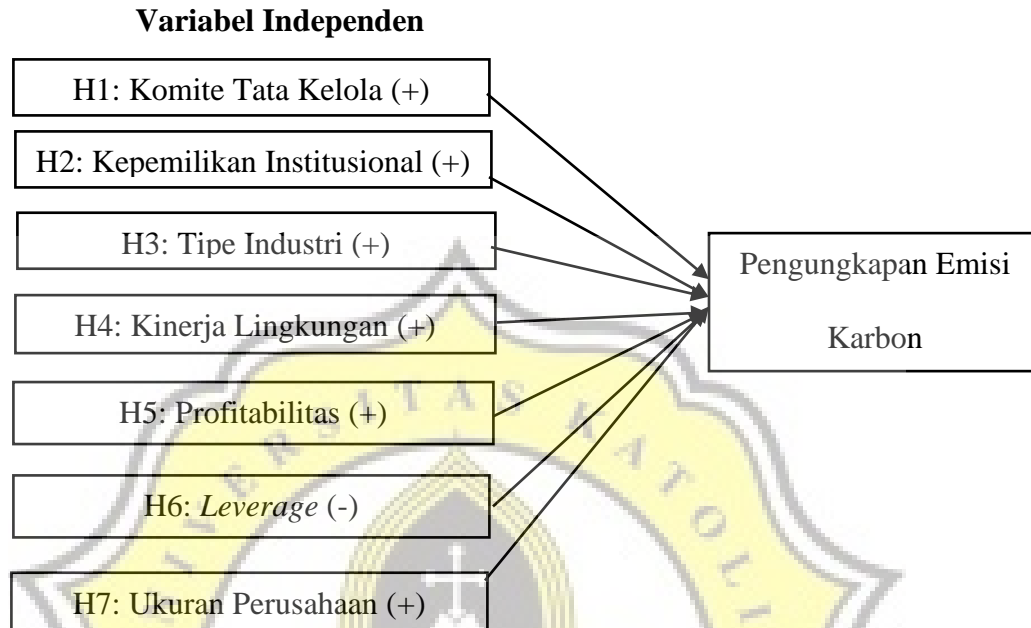
2) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan investasi yang tepat pada perusahaan agar lebih peduli terhadap isu lingkungan.

3) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk lebih perhatian terhadap permasalahan emisi karbon yang terjadi di Indonesia, serta dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan pengungkapan emisi karbon secara menyeluruh.

1.5 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Salah satu aspek masalah berkelanjutan yang lebih luas yaitu adanya masalah perubahan iklim. Perubahan iklim secara luas diakui sebagai isu lingkungan yang sangat signifikan yang sedang dihadapi ekonomi global. Hal tersebut dianggap menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh manusia. Maka dari itu, dalam menghadapi perubahan iklim perusahaan harus berusaha mengurangi emisi karbon dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan kerangka pikir di atas, pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini menggunakan beberapa faktor yaitu komite tata kelola, kepemilikan institusional, tipe industri, kinerja lingkungan, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai

variabel independennya. Penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon serta arah hubungannya.

